

Jakarta Sebagai Aktor Paradiplomasi Hijau Pada Masa Pemerintahan Anies Baswedan

Jakarta as an Actor of Green Paradiplomacy During Anies Baswedan Regime

Adinda Aulia Hafizha^{a,1}, Innayah Yanwari^{b,2}, Shafa Salsabila Nadiyah Putri^{c,3}, Maharani Herwidianti^{d,4}, Diaz Prameswara^{e,5}

^{a,b,c,d,e}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Rs. Fatmawati, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

hafizhadinda@gmail.com¹, inayahyanwari@gmail.com², shafasalsabila134@gmail.com³, danty.hk@gmail.com⁴, prameswaradiaz09@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Jakarta sebagai aktor paradiplomasi hijau pada masa pemerintahan Anies Baswedan yang ditinjau dari dampak, tantangan, dan masa depan mitigasi perubahan iklim di Jakarta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui studi literatur artikel, dokumen, dan karya ilmiah yang relevan untuk kemudian dilakukan analisis interpretasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Anies Baswedan, Jakarta telah menunjukkan peran yang aktif sebagai aktor paradiplomasi lingkungan. Adapun motivasi Jakarta dalam menjalankan upaya paradiplomasi hijau adalah untuk mencari solusi lain dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang telah lama menjadi perhatian pemerintah lokal sekaligus memperkuat citra sebagai kota hijau berkelanjutan. Implementasi dari paradiplomasi hijau yang dicanangkan Jakarta ditunjukkan dengan partisipasinya dalam mempromosikan kesadaran lingkungan melalui event Formula E, memegang peranan sebagai anggota komite C40, dan menjadi Co-President dalam forum UCLG-ASPAC. Dapat disimpulkan bahwa selama pemerintahan Anies Baswedan, Jakarta telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam mewujudkan cita-cita menjadi kota global dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Anies Baswedan, Jakarta, Kota Hijau Berkelanjutan, Paradiplomasi Hijau

ABSTRACT

This research aims to find out how Jakarta's role as a green paradiplomacy actor during Anies Baswedan's administration in terms of impacts, challenges, and the future of climate change mitigation in Jakarta. By using qualitative research methods and a case study approach, data was collected through a literature study of relevant articles, documents, and scientific works to then conduct in-depth interpretation analysis. The results show that during Anies Baswedan's administration, Jakarta has shown an active role as an environmental paradiplomacy actor. Jakarta's motivation in carrying out green paradiplomacy efforts is to find other solutions to environmental problems that have long been a concern of the local government while strengthening its image as a sustainable green city. The implementation of Jakarta's green paradiplomacy is demonstrated by its participation in promoting environmental awareness through Formula E events, holding a role as a member of the C40 committee, and becoming Co-President of the UCLG-ASPAC forum. It can be concluded that during Anies Baswedan's administration, Jakarta has shown a very strong commitment in realizing the goal of becoming a global city with a sustainable development agenda.

Keywords : Anies Baswedan, Green Paradiplomacy, Green Sustainable City, Jakarta

Info Artikel :

Disubmit: 10 November 2023

Direview: 10 Desember 2023

Diterima : 05 Januari 2024

Copyright © 2024 – PIR Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi dan regionalisasi telah mendorong perubahan agenda politik dan ekonomi global, yang kemudian berdampak cukup besar terhadap agenda pembangunan seluruh negara. Interdependensi dan efek sinergis dari dua kekuatan pendorong global ini telah menyebabkan situasi di mana keputusan yang mempengaruhi fungsi bidang politik, ekonomi, dan budaya tidak lagi dipegang oleh negara nasional, melainkan oleh tingkat supranasional, sub-nasional dan internasional sebagai kekuatan yang telah tumbuh besar dalam beberapa dekade terakhir.

Berbagai aktor baru ini telah secara serius menantang *status quo* pemerintah nasional sebagai satu-satunya aktor utama dalam hubungan internasional. Sebagai implikasinya, negara-bangsa modern mendapati diri mereka menangani urusan internasional maupun nasional yang dikelilingi oleh perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, dan badan-badan supranasional. Selain itu, kemampuan negara untuk mengelola urusan nasional telah dilemahkan oleh faktor-faktor seperti globalisasi, kapitalisasi modal yang tidak terbatas, dan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam situasi seperti ini, tampaknya wajar jika negara semakin kehilangan otoritas dan kedaulatan tradisionalnya. Akibatnya, beberapa konsep kunci hubungan internasional, seperti diplomasi tradisional (yang berpusat pada negara), mulai bergeser menjadi diplomasi multi-level dan multi-jalur yang menandakan partisipasi aktor-aktor non pemerintah pusat dalam kegiatan diplomasi.

Salah satu aktor yang berpartisipasi aktif dalam hubungan luar negeri adalah entitas subnasional, atau yang umumnya dikenal sebagai pemerintahan daerah, dalam suatu terminologi yang bernama paradiplomasi. Berasal dari gabungan kata para yang bermakna “paralel” dan diplomasi, paradiplomasi merupakan bentuk komunikasi politik yang ditujukan untuk mencapai kepentingan ekonomi, politik, budaya atau lainnya yang terkait dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan aktor transnasional lain, baik berbentuk pemerintah maupun non-pemerintah [1]. Sebagai fenomena yang terus berkembang, paradiplomasi juga memiliki terminologi lainnya, seperti *subnational diplomacy*, *constituent diplomacy*, dan *microdiplomacy*.

Schiavon [2] berpendapat bahwa ada beberapa tujuan penting yang ingin dicapai oleh entitas subnasional melalui aktivitas internasional mereka, seperti tujuan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam keempat komponen ini, entitas subnasional berupaya untuk mempromosikan pembangunan lokal, dan oleh karena itu kegiatan paling mendasar yang dilakukan dalam urusan hubungan luar negeri pada level regional adalah promosi ekonomi, mencari pasar luar negeri untuk produk lokal, menarik investasi asing (FDI), meningkatkan potensi pariwisata, dan mendorong transfer teknologi melalui kerja sama internasional yang terstruktur. Selain beberapa motif yang telah disebutkan sebelumnya, entitas subnasional juga menganggap diri mereka sebagai wilayah yang paling terpengaruh akan dampak dari globalisasi, namun pada saat yang bersamaan, memiliki potensi sumber daya yang lebih baik jika dikembangkan dengan benar oleh pemerintah regional setempat. Oleh karena itu, entitas subnasional juga mencoba memanfaatkan tren saat ini untuk mempromosikan kepentingan mereka di luar batas-batas negara, seperti meningkatkan kepedulian masyarakat internasional akan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim yang disampaikan di berbagai forum internasional.

Jakarta adalah ibu kota Indonesia dengan luas 662,33 km² dan merupakan kota terpadat di Indonesia, dengan jumlah penduduk 10.644.776 jiwa [3]. Jakarta terletak di daerah pesisir dan delta yang dilalui oleh 13 sungai utama dan dua kanal. Sebagai sebuah delta, Jakarta berisiko tinggi mengalami penurunan permukaan tanah dan banjir karena dataran aluvialnya yang rendah dan datar [4]. Faktanya, empat puluh persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, sehingga Jakarta berisiko tinggi terkena dampak kenaikan permukaan air laut [5]. Tidak terbatas pada komponen air dan tanah, masalah lingkungan lainnya bagi Jakarta berupa kualitas udara yang buruk. Pada tahun 2019, menurut AirVisual, Jakarta memiliki AQI (Air Quality Index/ indeks kualitas udara) sebesar 210, setingkat lebih tinggi daripada kota lainnya yang telah lama memiliki reputasi kualitas udara yang

buruk pula, seperti Beijing, Dubai, dan New Delhi [6]. Mengingat karakteristik Jakarta sebagai daerah delta yang sangat rentan terkena dampak bencana alam, tidak mengherankan jika Jakarta juga memiliki risiko tinggi untuk terdampak efek dari perubahan iklim. Faktanya, selama satu dekade terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa 98% dari bencana alam di Indonesia adalah peristiwa hidrometeorologi. Jenis bencana ini kemungkinan besar akan diperburuk oleh perubahan iklim [7].

Berbagai upaya mitigasi perubahan iklim telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, diantaranya yaitu membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengadaan transportasi yang ramah lingkungan serta terintegrasi, pembangunan kawasan *low emission zone* (LEZ), peluncuran program *net zero carbon* (NEZ) dan *green building*, serta anjuran kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan daur ulang [8]. Akan tetapi, upaya ini belum mencapai hasil yang maksimal, dikarenakan pendanaan yang relatif masih sedikit serta kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan dampak dari perubahan iklim secara langsung berpengaruh terhadap minimnya partisipasi publik akan upaya mitigasi perubahan iklim dari pemerintah DKI Jakarta [9]. Maka dari itu, mengingat bahwa perubahan iklim merupakan isu yang harus ditangani bersama baik dalam lingkup nasional maupun internasional, gubernur DKI Jakarta yang menjabat pada periode 2017-2022, yaitu Anies Baswedan kemudian mencari opsi lain untuk menangani dampak perubahan iklim, salah satunya melalui penyelenggaraan hubungan luar negeri dengan kota-kota lainnya di seluruh dunia untuk melakukan kolaborasi dan diskusi bersama mengenai isu-isu lingkungan, yang kemudian disebut dengan terminologi *paradiplomasi hijau*.

Setzer [10] mendefinisikan istilah *environmental paradiplomacy* atau *paradiplomasi lingkungan* sebagai keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional, yang dilakukan melalui dan/atau independen dari pemerintah nasional, yang bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan global. Sejumlah penstudi lain juga menyebut *paradiplomasi lingkungan* sebagai *green paradiplomacy* [11] dan *climate paradiplomacy* [12]–[14]. Dalam terminologi *paradiplomasi hijau*, semakin banyak literatur yang secara khusus mengeksplorasi aksi iklim global dari pemerintah daerah, terutama aksi ini dipimpin oleh entitas federasi di negara-negara Barat dan perkembangannya sangat pesat sebagai respon dari dampak perubahan iklim [15]. Sebuah studi yang dilakukan di negara bagian California dan São Paulo menyoroti bagaimana keterlibatan proaktif daerah dapat mengatasi kurangnya kepemimpinan pemerintah nasional dalam mengatasi krisis iklim [16]. Selain itu, studi lainnya terhadap California dan Quebec menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut (sebagai aktor *paradiplomasi*) telah menerapkan sebagian besar ketentuan utama Perjanjian Paris di yurisdiksi masing-masing. Bahkan, keduanya sepenuhnya mematuhi ketentuan konservasi, peningkatan penyerap, dan penyimpanan karbon serta pendidikan akan perubahan iklim [14]. Partisipasi global kota-kota juga mendapat perhatian, meskipun sebagian besar melalui jaringan kota transnasional seperti C40 Cities, dimana peran jaringan kota dalam membentuk *common-ground* harus menjadi bagian inti dari agenda mitigasi perubahan iklim. Hal ini tidak hanya berfokus pada aktor baru dalam tata kelola iklim, namun juga meningkatkan peran pemerintah daerah dengan berpartisipasi dalam jaringan kota yang berbeda melalui keanggotaan serta membentuk jejaring dengan aktor lain seperti organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, aktor sektor swasta dan organisasi filantropi [17].

Di Indonesia, desentralisasi telah memungkinkan pemerintah daerah mengambil fungsi dalam menjalin hubungan internasional, maka terminologi *paradiplomasi* bukan suatu istilah yang benar-benar asing di Indonesia. Adapun *paradiplomasi* di Indonesia didorong oleh adanya domestikasi isu-isu global, desentralisasi kekuasaan, dan adanya fragmentasi lembaga pusat yang kuat [18]. Merujuk pada poin pertama faktor pendorong *paradiplomasi* Indonesia, yaitu domestikasi isu global, tidak mengherankan jika perubahan iklim juga mendasari terjadinya *paradiplomasi hijau* di Indonesia. *Paradiplomasi* di bidang lingkungan ini terbukti telah memberikan dampak positif bagi daerah sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Harakan *et al.* [19] bahwa praktik

paradiplomasi telah memberikan dampak positif bagi Kabupaten Bantaeng dalam upaya peningkatan kualitas manajemen sanitasi di wilayah tersebut. Upaya ini disebut juga didukung oleh adanya transfer teknologi dalam menunjang efektivitas dan efisiensi manajemen limbah serta kebersihan wilayah. Serupa dengan Kabupaten Bantaeng, kota Surabaya juga menjalin hubungan paradiplomasi lingkungan dengan kota Kitakyushu, dimana kerja sama ini berfokus pada peningkatan pembiasaan efisiensi energi dan alat energi rendah karbon untuk menciptakan *low carbon society* [20]. Selain itu, Surabaya juga berupaya mempelajari teknik pengelolaan sampah dari Kitakyushu dan membentuk program lainnya seperti kota rendah karbon, daur ulang sampah, pengelolaan sumber energi, konservasi hutan, dan pengembangan ekowisata [21]. Kolaborasi antara Surabaya dan Kitakyushu telah menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat setempat, dimana permasalahan seperti kepadatan penduduk, pencemaran air dan udara, serta permasalahan pengelolaan sampah telah teratasi dengan sangat baik, hingga Surabaya dapat menjadi tuan rumah "5th Regional 3R Forum in Asia & The Pacific" dan mendapat julukan sebagai salah satu kota terbaik dalam kategori manajemen sampah di Indonesia [22], [23]. Tidak hanya kerjasama Surabaya-Kitakyushu, praktik paradiplomasi di Indonesia telah dilakukan oleh kota Bandung. *The Waste Management Support Project Toward a Sustainable Resource Recycling Society* dilaksanakan dari tahun 2017 hingga 2020 sebagai bagian dari kolaborasi *sister city* antara Bandung dan kota Kawasaki di bidang lingkungan [24].

Sementara itu, kota Jakarta sebagai ibukota negara juga berupaya mengatasi dampak perubahan iklim dengan melakukan paradiplomasi melalui berbagai jaringan kota serta membentuk *city branding* dengan membangun Jakarta International Stadium (JIS) dan menyelenggarakan *mega-event* olahraga seperti Formula E. Adapun selain memiliki manfaat sebagai sarana pelaksanaan acara olahraga internasional, penyelenggaraan Formula E dan Pembangunan JIS juga memiliki agenda lainnya, yaitu untuk melambangkan transformasi hijau perkotaan sebagai pembangunan lokal [25], [26]. Beberapa penelitian yang telah ditinjau dalam studi ini telah menyampaikan secara komprehensif mengenai praktik paradiplomasi Indonesia dalam bidang lingkungan. Akan tetapi, sejauh ini belum ada penelitian yang berfokus pada sudut pandang Jakarta sebagai aktor subnasional dalam rezim multi-level lingkungan yang ditinjau dari beberapa teori paradiplomasi hijau yang relevan. Dengan demikian, untuk melengkapi *research gap* tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara lebih lanjut terkait praktik paradiplomasi hijau DKI Jakarta, terutama pada era pemerintahan Anies Baswedan. Selain itu, artikel ini juga akan menelaah dampak dan masa depan dari paradiplomasi Jakarta dalam isu lingkungan internasional.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun menurut Creswell [27], Penelitian kualitatif adalah teknik untuk mengeksplorasi dan memahami interpretasi individu, kelompok, atau suatu peristiwa yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan berbagai sumber empiris, seperti teks, wawancara, dan studi kasus yang akan dianalisis secara mendalam [28]

Pendekatan studi kasus adalah suatu teknik yang diterapkan dalam penelitian kualitatif di mana peneliti menggunakan satu atau beberapa kasus yang berkaitan untuk mempelajari fenomena tertentu secara lebih rinci [27]. Kasus yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian dibatasi oleh rentang waktu tertentu, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan periode yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah dokumen, artikel jurnal, dan berita yang terkait dengan paradiplomasi hijau DKI Jakarta pada era pemerintahan Anies Baswedan, yaitu rentang waktu 2017-2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradiplomasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan unit-unit kecil dari suatu negara (daerah) dalam berbagai aktivitas internasional dalam rangka mencapai kepentingan daerahnya (*region interest*) melalui perdagangan terbuka dan misi kebudayaan di luar negeri, menandatangani perjanjian dengan aktor-aktor sub-negara lain, dan berpartisipasi dalam jaringan kerja sama regional internasional. Dalam praktiknya, setiap bentuk paradiplomasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah memiliki beberapa dimensi kunci yang ditulis oleh Brian Hocking dan dirangkum oleh Aldecoa dan Keating dalam buku yang berjudul *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments* [29], yakni:

1) *Aims & motivations*

Aims serta *motivations* merujuk pada tujuan serta motivasi bagi suatu daerah dalam melaksanakan paradiplomasi dalam berbagai bidang. Adapun tujuan tersebut dapat berupa pengupayaan daerah menjadi aktor atau inisiator yang berusaha mengejar kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang berasal dari lokal di luar lingkup nasional, bertindak sebagai saluran bagi aktor lain agar dapat mengartikulasikan kepentingan maupun isu-isu yang berkaitan dengan wilayah subnasional di arena internasional, serta entitas subnasional dapat menjadi sasaran bagi kegiatan internasional yang dapat mempengaruhi aktor lainnya, seperti U20, C40, dan kegiatan internasional lainnya.

2) *Extent and direction of involvement*

Arah dan sejauh mana keterlibatan daerah (*to what extent?*) menjelaskan mengenai tingkat kehadiran internasional yang ditunjukkan oleh entitas subnasional, arah yang diambil, dan kesempatan untuk memberikan pengaruh. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keterlibatan suatu daerah dalam paradiplomasi, yaitu sumber daya birokrasi, letak geografis antar negara maupun antar entitas subnasional, lokasi dan lingkungan kebijakan, tingkat asimetri di dalam sistem federal dan besar kecilnya kekuasaan yang diberikan kepada entitas subnasional.

3) *Structures and resources*

Tujuan dan keterlibatan dari paradiplomasi daerah akan ditentukan oleh karakteristik struktural entitas subnasional dan sumber daya yang mereka punya untuk mengejar kepentingan daerah di kancah internasional. Daerah yang kaya akan sumber daya dengan pengaruh politik yang kuat di tingkat nasional akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk memasuki arena internasional dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya yang kurang memadai. Akan tetapi, sumber daya yang dimaksud bukan hanya didasarkan dalam ukuran moneter dan kekuasaan, melainkan juga keahlian birokrasi daerah dalam kebijakan tertentu yang memiliki kemungkinan besar tidak dapat ditandingi oleh pemerintah pusat.

4) *Levels of participation*

Level yang dimaksud merupakan berbagai jaringan di mana kota-kota dapat melakukan paradiplomasi. Level dikategorisasikan menjadi *subnational*, *governmental*, *intergovernmental*, *transgovernmental*, dan *transnational*. Dimensi ini sangat berkaitan dengan dimensi kedua, yakni keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan paradiplomasi.

5) *Strategies*

Ada tiga strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam paradiplomasi. Pertama, strategi mediasi, dimana entitas subnasional dapat menggunakan saluran yang tersedia bagi mereka untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan nasional. Kedua, yaitu strategi primer, dimana pemerintah daerah mengerahkan sumber daya mereka untuk beraksi dalam arena internasional secara langsung dengan tujuan untuk meningkatkan eksistensi di panggung internasional. Sementara itu, strategi sekunder umumnya mencerminkan situasi di mana pemerintah daerah merasa bahwa kepentingan mereka tidak tercermin dalam kebijakan

nasional sehingga mendorong mereka untuk melakukan lobi dan/atau membangun koalisi kepentingan di berbagai jaringan kota dunia.

Sejak tahun 1970-an, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sukses menjalin berbagai hubungan kerjasama luar negeri yang dipayungi oleh landasan hukum yang konkret, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini membahas tentang bergesernya kewenangan pemerintah daerah, yang semula bersifat tersentralisasi di pemerintah pusat, kemudian berubah menjadi desentralisasi dengan konsep otonomi daerah. Dalam konsep tersebut, tercantum kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan sebagian bentuk kerja sama luar negeri, terutama dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) memiliki tugas serta wewenang dalam memberikan persetujuan terhadap wacana kerja sama internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan daerah serta diusung oleh pemerintah daerah setempat. Dalam penjelasan pasal yang sama, diatur pula bahwa kerja sama yang dapat dilakukan pemerintah daerah berupa *sister city/province*, kerja sama dalam pemberian bantuan kemanusiaan, pemberian dan permintaan pinjaman, serta penyertaan modal [30]. Pasal ini kemudian dijadikan acuan bagi aktivitas paradiplomasi Jakarta dalam pengembangan hubungan kerjasama luar negeri oleh DKI Jakarta selaku Ibukota negara juga pusat pemerintahan, sebagai acuan pembangunan nasional, serta pembangunan perkotaan bagi provinsi di Indonesia. Seperti halnya Jakarta dan Beijing yang telah bekerja sama sejak tahun 1992 yang diawali dengan adanya Letter of Intent (LoI) di Beijing terkait bidang perdagangan antara KADIN Tingkat I dan China Council for the Promoting of International Trade (CCPIT) Beijing Sub-Council [31]. Kerjasama berlanjut setelah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) di Jakarta beberapa bulan setelahnya. Administrasi kota, olahraga, kebudayaan, manajemen pariwisata, kesehatan umum, dan bisnis skala kecil dan menengah adalah bidang kerjasama yang saat itu disepakati [32]. Adapun untuk mengesahkan praktik paradiplomasi menjadi tindakan konkrit dan legal dari pemerintahan setempat, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 269 Tahun 2014 Tentang Pola Kerja Sama Luar Negeri yang mencakup berbagai panduan mengenai kemitraan dan kolaborasi dengan entitas asing, proyek penelitian dan pengembangan bersama dengan entitas asing, program pertukaran untuk mahasiswa, peneliti, dan profesional dengan entitas asing, dan perjanjian investasi dan perdagangan dengan entitas asing.

Ibukota Jakarta merupakan salah satu kota terpadat serta memiliki aktivitas ekonomi yang sibuk sekaligus menjadi kota yang mengalami isu kerusakan lingkungan yang cukup besar. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 lalu oleh salah satu perusahaan konsultan yakni Verisk Maplecroft yang menyebutkan bahwa terdapat kota-kota di dunia yang memiliki risiko ancaman isu perubahan iklim salah satunya di wilayah Asia. Dalam penelitian ini, Jakarta masuk sebagai urutan pertama dalam kota yang dianggap memiliki potensi menghadapi bahaya isu lingkungan seperti polusi udara, banjir, hingga ancaman seperti kota yang akan tenggelam. Tercatat pada situs IQAir pada 15 Juni 2023 pukul 06:00 WIB, skor indeks kualitas udara mencapai angka 167 (kategori merah) yang berarti kualitas udara di Jakarta tidak sehat sehingga direkomendasikan untuk menggunakan masker, menjauhi udara luar, menghidupkan penyaring udara, bahkan menghindari aktivitas luar ruangan. Kemudian, di kategori kota besar pukul 14:00 WIB, Jakarta berada di peringkat 5 sebagai kota besar yang berpolusi di dunia dengan skor indeks kualitas udara 144 yang masuk ke kategori kualitas udara Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif. Bahkan, tercatat melalui web IQAir bahwa polusi udara telah merugikan sekitar 1.3 miliar dolar bagi Jakarta pada tahun 2023 [33]. Bahkan, pada tahun 2019, Tim Advokasi Gerakan Ibu Kota menggugat Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan terkait pencemaran udara di DKI Jakarta. Para warga, yang kemudian mendaftarkan gugatan sebagai *Citizen Law Suit* (CLS), menuntut pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan baru dalam mengatasi tingkat polusi udara di Ibukota yang semakin memburuk [34].

Berdasarkan beberapa permasalahan lingkungan yang dialami, tentunya diperlukan upaya pemerintah setempat dalam menangani permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan juga dapat

bersifat melibatkan pihak eksternal dengan upaya kerjasama maupun kegiatan paradiplomasi. Dalam kegiatan paradiplomasi yang dilakukan oleh suatu kota tentu akan menghasilkan dampak kepada kota atau daerah tersebut. Upaya paradiplomasi yang dimaksud mengarah pada *green paradiplomacy* yang diharapkan dapat memberikan dampak baik terhadap lingkungan di kota atau daerah itu sendiri. Di era kepemimpinan Anies Baswedan dengan gaya *energize*-nya, yakni sejak 16 Oktober 2017 – 16 Oktober 2022, Anies kerap mendorong jajaran kepemimpinannya untuk turut aktif dalam memainkan peran diplomasi kota (*city diplomacy*) di kancah internasional dalam berbagai forum serta membuat kebijakan yang mengarah pada konservasi lingkungan. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas mengenai beberapa aktivitas paradiplomasi Jakarta yang disertai implikasinya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

A. Paradiplomasi Hijau

Paradiplomasi lingkungan, atau yang umumnya dikenal sebagai paradiplomasi hijau merupakan sebuah aktivitas antar entitas subnasional yang bersifat lintas negara untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan global. Untuk sebuah paradiplomasi lingkungan ini terjadi, diperlukan tiga kriteria yang harus dipenuhi, yakni (1) aktor utama yang terlibat harus pemerintah daerah, (2) tindakan mereka harus terjadi secara transnasional, dan (3) harus diarahkan untuk mengatasi masalah lingkungan global. Terus berkembangnya kehadiran pemerintah sub-negara di kancah internasional merupakan proses dengan konsekuensi politik yang tak terhindarkan dan tidak dapat diubah. Pentingnya paradiplomasi hijau sebagai kerangka kerja bagi entitas subnasional, adalah karena kebijakan daerah yang memiliki arti penting bagi ekosistem, penggunaan sumber daya, dan lain-lain. Kedua, entitas *sub-state* umumnya bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Bahkan, entitas subnasional dianggap paling dekat dengan penduduk suatu negara, maka dari itu partisipasi dari entitas daerah akan sangat penting untuk efektivitas kehidupan yang berkelanjutan [1].

Senada dengan kerangka kerja paradiplomasi hijau yang disampaikan oleh Kuznetsov, partisipasi entitas subnasional dalam paradiplomasi lingkungan didasari oleh beberapa alasan, diantaranya status negosiasi mengenai isu lingkungan dalam rezim internasional dengan anggota negara-bangsa dianggap kurang maksimal, ditandai dengan keengganan negara-bangsa untuk mengambil komitmen yang lebih kuat dalam menghadapi isu pemanasan global [35]. Terlebih, dampak perubahan iklim sangat dirasakan di tingkat lokal dan regional. Sehingga, seruan elektoral atau dukungan politik dari masyarakat setempat selaku pihak yang paling terdampak isu lingkungan semakin masif, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah baru. Dengan demikian, tindakan pemerintah pusat yang kurang proaktif dalam isu lingkungan kemudian melemahkan legitimasi *nation-state* sebagai *decision maker*, yang berakibat menguatnya otoritas lain seperti pemerintahan daerah untuk bertindak sebagai pejabat pengambil keputusan dalam isu-isu lingkungan [36].

B. Paradiplomasi Hijau dan Jakarta

1) Dampak dari agenda Formula-E dalam kebijakan paradiplomasi hijau

Upaya paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta merupakan salah satu instrumen yang dilakukan untuk dapat mencapai atau mewujudkan kepentingan dari kota tersebut. Salah satu bentuk upaya paradiplomasi yang dilakukan oleh Jakarta terutama di era pemerintahan Anies Baswedan ialah kerjasama antara Formula E Operations Limited (FEO) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan *event* olahraga internasional Formula E tahun 2020/2021. FEO sendiri merupakan perusahaan internasional lisensi yang mengoperasikan Formula E dan menetapkan Jakarta sebagai tuan rumah Formula E yang digelar pada 4 Juni tahun 2022 lalu [37]. Penyelenggaraan *event* ini cukup berhasil membuktikan bahwa Jakarta sebagai entitas *sub-state* dapat menjalin hubungan kerjasama luar negeri untuk mewujudkan kepentingan entitas daerahnya. Salah satu kepentingan yang ingin dicapai dalam program ini adalah kebijakan paradiplomasi hijau yang dilakukan oleh pemerintah melalui kampanye pembangunan berkelanjutan dan penanganan terhadap isu polusi

yang terus berulang. Hal ini turut disampaikan oleh Anies Baswedan kepada perusahaan FEO sendiri bahwa saat ini Kota Jakarta telah dinobatkan sebagai kota terpolusi di dunia, hal tersebut membuat pemerintah daerah semakin fokus dalam penanganan isu polusi dan isu kenaikan suhu permukaan bumi (*Global Warming*). Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta dalam memfokuskan kebijakan terkait isu ini adalah mentransformasikan Jakarta sebagai kota yang menggunakan kendaraan bebas emisi seperti bus listrik maupun kendaraan pribadi (mobil atau motor) bertenaga listrik. Upaya transformasi tersebut turut dikampanyekan melalui agenda Formula E ini sehingga masyarakat lebih *aware* terhadap penggunaan kendaraan listrik untuk meminimalisir tingkat polusi udara di Jakarta [37]. Dengan penyelenggaraan *event* ini pula, diharapkan para penonton dari *event* tersebut maupun masyarakat luas dapat berpartisipasi membantu Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas udara bersih sehingga dapat menjadi kota yang ramah lingkungan.

Kampanye dari penggunaan kendaraan listrik dalam acara Formula E pada tahun 2022 lalu juga sukses dalam mendorong seluruh warga negara Indonesia untuk mulai beralih ke kendaraan listrik. Hal ini dapat kita lihat dalam jumlah kenaikan penjualan dari mobil berbasis BEV (*battery electric vehicle*) atau sering disebut juga dengan mobil listrik yang cukup signifikan di tahun ini dari tahun sebelumnya yakni pada kuartal I tahun 2023 (Januari - Maret).



Gambar 1. Grafik volume bulanan mobil listrik BEV di Indonesia kuartal I (Januari-Maret) 2022-2023.

Sumber: databoks.katadata.co.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total penjualan mobil listrik BEV pada tahun 2022 kuartal I (Januari-Maret) hanya sekitar 64-unit dengan rincian Januari (36 unit), Februari (9 unit), dan Maret (19 unit). Sedangkan jika kita melihat total penjualan pada tahun 2023 yang melonjak cukup signifikan dimana pada kuartal I (Januari-Maret) sekitar 1800-unit dengan rincian Januari (298 unit), Februari (390 unit), dan Maret (1.113 unit) atau mengalami lonjakan peningkatan sekitar 2.700%. Apabila peningkatan ini bertahan hingga akhir tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa awareness warga Indonesia mengenai isu perubahan iklim juga

mengalami peningkatan dengan tingginya partisipasi masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.

2) Dampak dari agenda C40 dalam kebijakan paradiplomasi hijau

C40 (*Cities Leadership Group*) merupakan suatu forum yang disepakati oleh berbagai kota dari berbagai negara yang bertujuan untuk memegang teguh komitmen dalam mengatasi permasalahan iklim (*climate change*). Forum ini merupakan salah satu wadah yang efektif bagi para *sub-state actors* dalam memainkan peran paradiplomasi di kancah internasional sembari aktif berkontribusi dalam aksi lingkungan dan perubahan iklim [38]. Dalam pelaksanaan komitmen tersebut, C40 juga turut menggandeng Jakarta sebagai salah satu kota yang turut meratifikasi perjanjian kerjasama untuk mengembangkan *Climate Action Plan* (CAP) pada tahun 2019, yaitu masa pemerintahan gubernur Anies Baswedan, yang mana perjanjian ini dinilai selaras dengan *Paris Agreement* [39]. Komitmen CAP ini juga bertujuan untuk mendorong entitas subnasional yang tergabung untuk dapat melakukan inovasi kebijakan serta memperkuat aksi nyata dalam isu perubahan iklim. Penandatanganan CAP oleh Jakarta juga membuktikan bahwa Jakarta berkomitmen tinggi dalam menanggapi isu perubahan iklim dengan menerapkan fokus utama dalam target yang dicanangkan yakni target jangka pendek di tahun 2030 mendatang yakni mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (*Low Emission Carbon*) sekitar 50%, serta target jangka panjang yakni untuk mencapai net zero emission di tahun 2050 [38]

Peranan diplomasi kota Jakarta (*city diplomacy*) yang aktif dan berbasis lingkungan oleh Gubernur Anies Baswedan juga dinilai berpengaruh terhadap inovasi kebijakan lingkungan dalam ranah domestik. Melalui kerja sama yang dilakukan dengan C40 dalam masalah lingkungan, Gubernur Anies Baswedan mencanangkan suatu program yang diluncurkan pada September 2022 lalu yang dinamai "*Hospital Improvement for Just and Green Recovery (HIJGR)*". Program ini merupakan salah satu program yang bertujuan dalam upaya peningkatan rumah sakit untuk Pemulihan yang Hijau dan Berkeadilan. Program ini diluncurkan bersamaan dengan lalu bersama program Implementasi Aksi Iklim (*Climate Action Implementation/CAI*) serta dipimpin oleh *C40 Cities Finance Facility* (CFF) [40]. Program tersebut menunjukkan bentuk komitmen yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam mengintegrasikan aksi nyata dalam isu perubahan iklim dalam struktur kota. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mentransformasikan pengelolaan limbah atau energi dengan *management waste* yang baik, serta dapat berkontribusi dalam penurunan dari gas emisi rumah kaca melalui energi yang terbarukan serta efisiensi energi yang dilakukan di 28 Rumah Sehat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Dalam pelaksanaan program ini, terdapat banyak dukungan yang diberikan dari pihak eksternal seperti dukungan dari pemerintah Inggris dalam hal pendanaan, serta dukungan dari CAI (*Climate Action Implementation*) dalam hal teknis. Langkah transformasi program ini dinilai menjadi salah satu *best practice* dari Kota Jakarta melalui C40 network serta langkah nyata dalam pengimplementasian kebijakan *green paradiplomacy* [41].

Keikutsertaan Jakarta dalam C40 menjadikan kota ini memiliki kesamaan visi serta semangat yang membara seperti London dalam menghadapi isu perubahan iklim, hingga semangat ini membawah Jakarta menjadi anggota Komite C40. Hal ini dituangkan melalui kebijakan revitalisasi Kota Tua sebagai Kawasan Rendah Emisi (*Low Emission Zone*) seperti yang telah dilakukan oleh kota Copenhagen yang merealisasikan kebijakan zona bebas kendaraan. Anggaran dari revitalisasi Kota Tua tersebut mengocek dana yang cukup besar karena banyaknya pembangunan yang diperlukan seperti pembuatan air mancur, penataan lampu jalan, pembangunan *shelter* angkutan publik serta pembuatan trotoar jalan dalam rangka memfasilitasi warga untuk berjalan kaki [42]. Proses revitalisasi ini dilaporkan telah selesai

pada Agustus tahun 2022 lalu dan kawasan Kota Tua kini resmi menjadi daerah yang rendah akan gas emisi sehingga terdapat pula kebijakan dalam pembatasan kendaraan bermotor untuk mengurangi tingkat kemacetan. Selain itu, kawasan Kota Tua juga semakin terhubung serta terjangkau dengan transportasi umum seperti *Commuter Line* (KRL) dan Transjakarta.



Gambar 2. Potret Revitalisasi Kota Tua Jakarta
Sumber: Akun instagram @jsclab dan @dkijakarta

3) Dampak dari agenda UCLG-ASPAC dalam kebijakan paradiplomasi hijau

Adanya sistem Westphalia turut mengubah cara pandang mengenai kedaulatan negara. Adanya sistem ini mengakibatkan munculnya pandangan bahwa kedaulatan yang ada di tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan internasionalnya, harus bisa dibagi dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah mampu untuk berpartisipasi dalam level internasional serta dapat membentuk hubungan internasional dengan pemerintah daerah luar. Dalam implementasinya, instrumen yang dapat digunakan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas tersebut melalui organisasi internasional yakni UCLG-ASPAC (United Cities and Local Government – Asia Pacific). UCLG sendiri memiliki salah satu *regional section* untuk pemerintah daerah dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik yakni UCLG-ASPAC (United Cities and Local Government – Asia Pacific) dimana Jakarta menjadi salah satu bagiannya. Organisasi ini dapat didefinisikan sebagai salah satu *intergovernmental organization* (IGO) resmi yang didirikan di Taipei pada 14 April 2004 serta menghimpun pemerintah daerah, kota-kota, maupun asosiasi daerah terkhusus bagi negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Organisasi ini juga didirikan untuk memberikan wadah bagi para pemerintah daerah dalam upaya *transfer knowledge* kebijakan daerahnya masing-masing dalam konteks agenda pembangunan. Jakarta merupakan salah satu kota yang tergabung dalam organisasi ini sekaligus merupakan kota dimana kantor sekretariat organisasi berada.

Selain Kantor Sekretariat UCLG-ASPAC yang berada di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan juga dipilih sebagai salah satu Co-President untuk mewakili kawasan Asia Tenggara dari total 8 Co-President yang ada [43]. Selain menjadi arena dalam mengumpulkan advokasi antar pemerintah daerah, organisasi ini juga turut berkontribusi dalam

pengembangan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah setempat. Kontribusi atau program-program yang diberikan untuk pemerintah daerah tersebut mengacu terhadap tujuan agenda global yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs). Beberapa program strategis yang diangkat oleh UCLG seperti pengelolaan sampah di Jakarta yang diharapkan berguna dalam mendukung kebijakan nasional yang *concern* terhadap isu perubahan iklim.

Namun sangat disayangkan bahwa peranan dari UCLG-ASPAC terkait penanganan sampah tidak dapat diproyeksikan ke dalam sebuah bentuk *project*. Hal ini dikarenakan proyek seperti *zero waste* yang bekerja sama dengan UNESCAP hanya dapat dilaksanakan di kota yang memiliki infrastruktur minim serta ketidakmampuan dalam mengadopsi teknologi yang besar seperti di Kabupaten Malang dan Kota Jambi. Selain itu, beberapa program dari UCLG-ASPAC terkait penanganan limbah sampah akan selalu berhubungan dengan adanya lahan prioritas dimana hal ini sangatlah sulit dilakukan di Kota Jakarta dengan kesulitannya untuk menyediakan lahan yang memadai terkait program tersebut [43]. Meskipun demikian, UCLG-ASPAC ini juga turut memberikan peluang terhadap pemerintah daerah DKI Jakarta dalam upaya paradiplomasi hijaunya. Adanya UCLG-ASPAC dapat menjadi wadah dalam skala regional maupun internasional dalam melaksanakan program diskusi dengan pemerintah negara lain, dalam hal ini Jakarta dapat memanfaatkannya dalam berdiskusi, mempromosikan kebijakan, maupun menjalin kerjasama dengan pemerintah lain (*sister city*) terkait program pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, UCLG-ASPAC juga dapat memberi bantuan dengan memetakan potensi serta melakukan analisis perkotaan di Jakarta yang kemudian dapat menjadi bahan acuan dalam memproyeksikan kebijakan terkait penanganan limbah. Terakhir, UCLG-ASPAC ini juga dapat menjadi jembatan penghubung antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan maupun kerjasama dengan negara luar dalam hal pendanaan yang cukup besar dalam rangka implementasi proyek pengelolaan sampah nantinya [43].

4) Penghargaan bagi Jakarta

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa kepemimpinan Anies Baswedan cukup aktif dalam memainkan peran diplomasi kota (*city diplomacy*) nya di level internasional serta cukup fokus dalam membawa isu lingkungan Jakarta itu sendiri. Beberapa kebijakan yang diimplementasikan oleh Bapak Anies ini juga menghantarkan DKI Jakarta untuk dapat meraih beberapa penghargaan bergengsi diantaranya:

a. *Sustainable Transport Award*

Pada tahun 2021 lalu, Jakarta terpilih sebagai salah satu kota di Asia Tenggara yang dapat meraih penghargaan dalam *Sustainable Transport Award*. Penghargaan ini ditujukan terkait integrasi dari akomodasi transportasi publik yang terus dikembangkan di era Anies Baswedan terutama MRT, LRT, serta Transjakarta. Selain adanya perkembangan dari layanan transformasi publik, Jakarta juga dapat meraih penghargaan ini dikarenakan adanya integrasi layanan serta pembayaran dan pengembangan dari transformasi publik yang ramah lingkungan yakni bus listrik [44]. Penghargaan ini menjadikan pemerintah provinsi DKI Jakarta juga terus semangat untuk merevitalisasi beberapa fasilitas transportasi publik seperti trotoar dan halte agar masyarakat dapat turut berkontribusi mengurangi produksi gas emisi karbon dengan cara beralih ke moda transportasi publik.

b. Penghargaan Sebagai Kota Ramah Sepeda

Ibukota DKI Jakarta pada era Anies Baswedan juga mendapat penghargaan dari salah satu komunitas sepeda di Indonesia yakni Bike to Work Community (B2W) sebagai Kota Ramah Sepeda pada September tahun 2021 lalu [45]. Penghargaan ini ditujukan kepada Kota Jakarta dalam kategori kota metropolitan yang ramah akan

sepeda dan diikuti dengan Kota Bandung dan Surabaya untuk posisi kedua dan ketiga. Penghargaan yang diraih ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus mendukung budaya bersepeda dengan baik di Jakarta dan memberikan fasilitas yang memadai bagi jalur sepeda itu sendiri. Apabila hal ini terus dilakukan maka Kota Jakarta juga turut dapat berkontribusi tingkat polusi udara di wilayahnya.

C. Tantangan dan Masa Depan Paradiplomasi Hijau Jakarta

Anies Baswedan telah melakukan upaya kerjasama dengan berbagai entitas subnasional di luar negeri untuk mengimplementasikan pembangunan yang berbasis lingkungan. Dengan menjalankan kerja sama di bidang lingkungan, Jakarta diharapkan dapat menjadi kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Jakarta dalam upaya pengembangan paradiplomasi hijaunya adalah mencari rekan kota maupun daerah yang memiliki karakteristik dan permasalahan lingkungan yang sama, akan tetapi kota tersebut telah mampu untuk menanggulangi permasalahannya.

Memiliki karakteristik yang sama dengan Jakarta, yaitu padat penduduk dengan aktivitas yang padat dan industrialisasi yang besar, kota seperti Beijing di Tiongkok juga mengalami permasalahan yang sama dalam isu lingkungan. Akan tetapi, Tiongkok berhasil mengurangi polusi udara hanya dengan tujuh tahun, khususnya di kota-kota besar seperti Beijing dengan mengubah sumber energi transportasi umum yang sebelumnya menggunakan bensin menjadi gas. Hal ini juga didukung oleh penggunaan mobil listrik dengan diberikannya subsidi harga sehingga pembelian kendaraan listrik mendapatkan potongan harga. Selain itu, Beijing juga dengan keras membuat peraturan mengenai pembatasan serta penghapusan transportasi yang tidak ramah lingkungan, serta menciptakan sistem transportasi umum yang rendah karbon [46].

Melihat keberhasilan kota Beijing dalam menurunkan polusi udara, maka kota Beijing dapat menjadi peluang bagi Jakarta untuk melakukan kerja sama dalam bidang lingkungan. Terlebih, hubungan luar negeri antara Jakarta dengan Beijing sudah terjalin sejak lama dalam berbagai bidang, yakni administrasi perkotaan, olahraga, kesehatan masyarakat, kependudukan, manajemen pariwisata, dan industri berskala kecil dan kerajinan. Oleh karena itu, melihat karakteristik yang serupa dengan bentuk penanganan isu yang berbeda, peluang kerja sama Jakarta-Beijing menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Jakarta untuk mencapai target pengurangan emisi karbon serta mendapatkan ilmu, pengalaman, dan strategi dari Beijing yang telah berhasil mengurangi polusi udara dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kerja sama ini juga berpeluang untuk menunjukkan kepada mata dunia bahwa Jakarta siap menjadi *sustainable city* yang sesuai dengan cita-cita Jakarta menjadi kota global.

Hal tersebut juga didukung oleh Heru Budi Hartono selaku Pj Gubernur DKI Jakarta. Sebagai seorang petahana dari Kepala Biro Kerjasama Daerah dan Hubungan Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI Jakarta, dilantiknya Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan pimpinan hingga pilkada 2024 seharusnya membawa sejumlah agenda yang melibatkan upaya paradiplomasi dalam mengatasi masalah lingkungan di Jakarta. Diketahui dalam artikel berita yang ditulis oleh Rianti dalam Republika, Pj Gubernur DKI Jakarta akan berkomitmen pada kemakmuran kota Jakarta yang mencakup pembangunan infrastruktur dan transportasi yang diharapkan membawa dampak positif bagi kelestarian lingkungan. Fokusnya terhadap dua aspek pembangunan ini yang memungkinkan Jakarta untuk mentransformasi moda kendaraannya menjadi kendaraan berbasis listrik yang bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi udara [47]. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya dorongan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI dalam transformasi kendaraan ini dan adanya subsidi harga kendaraan listrik, baik untuk mobil maupun motor.

Namun, kontroversi akan bantuan subsidi mobil listrik marak diperbincangkan oleh masyarakat. Tidak hanya penuh kontroversi, dinamika politik Indonesia juga patut dipertimbangkan dalam menjalankan agenda paradiplomasi lingkungan ini. Terutama, mengingat pilkada 2024 sudah semakin dekat, dan pergantian pemimpin berakibat pada perbedaan kebijakan pula. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pemimpin yang memiliki visi pembangunan berbasis lingkungan serta memiliki kemampuan untuk melihat situasi politik internasional, memahami potensi pengembangan daerah melalui paradiplomasi, dan sering dengan banyaknya penolakan terhadap subsidi kendaraan pribadi berbasis listrik, maka pemerintah dapat mengutamakan kendaraan transportasi umum berbasis listrik terlebih dahulu untuk segera diimplementasikan demi menegakkan upaya memerangi perubahan iklim. Selain itu, diharapkan Jakarta juga dapat terus mengembangkan kiprahnya dalam paradiplomasi lingkungan, dengan menjalin hubungan dengan berbagai *city networks* maupun *sister cities* dengan berbagai kota di dunia.

Berdasarkan berbagai aktivitas yang telah ditelaah dalam paradiplomasi hijau DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan sudah menuai hasil yang baik dan bermanfaat bagi penduduk sekitar, dengan peningkatan pembelian mobil listrik, mayoritas masyarakat yang memilih menggunakan transportasi yang terintegrasi, dan munculnya beberapa wilayah yang rendah emisi karbon. Tidak hanya meninjau dari sisi manfaat, beberapa aktivitas paradiplomasi hijau yang telah dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan eksistensi Jakarta sebagai kota hijau berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif Gubernur petahana DKI Jakarta Anies Baswedan dalam berbagai forum lingkungan internasional seperti C40 dan UCLG-ASPAC. Untuk memahami motif DKI Jakarta dalam melakukan paradiplomasi hijau dapat ditelaah pada Tabel 1.

Table 1. Dimensi Kunci Paradiplomasi Hijau DKI Jakarta

Dimensi Kunci Paradiplomasi Menurut Brian Hocking	
Aims & Motivations	- Menciptakan <i>branding</i> sebagai kota hijau dan berkelanjutan untuk meningkatkan eksistensi dalam arena internasional. - Mencari solusi baru atas permasalahan lingkungan. - Mengajak masyarakat setempat agar peduli terhadap isu-isu lingkungan melalui penyelenggaraan acara yang berskala internasional.
Extent & Direction of Involvement	Arah keterlibatan Jakarta berupa aktor sekaligus inisiator dalam rezim lingkungan multilevel.
Structures & Resources	- Adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 269 Tahun 2014 Tentang Pola Kerja Sama Luar Negeri. - Jakarta telah mendirikan Biro Kerjasama Daerah dan Hubungan Luar Negeri sebagai portal utama dalam menjalankan paradiplomasi. - Kemampuan pemerintah DKI Jakarta dalam menghadapi permasalahan urbansiasi dan lingkungan menjadi nilai tambah dalam forum diskusi rezim lingkungan.
Levels of Participation	Global. Jakarta telah masuk sebagai anggota C40, UCLG-ASPAC, U20, dan jaringan kota lainnya yang berskala global.
Strategies	- Strategi primer untuk meningkatkan eksistensi sebagai kota dunia dan kota yang ramah lingkungan. - Strategi sekunder dengan meningkatkan koalisi internasional untuk mengatasi permasalahan lingkungan, terutama kualitas udara yang buruk.

Dalam poin pertama, tujuan Jakarta melakukan paradiplomasi hijau dapat dikategorikan menjadi tiga arah kebijakan, yakni *city branding*, lingkungan, dan masyarakat. Dalam rezim lingkungan multilevel, diperlukan *branding* atau citra yang kuat bagi kota untuk bergabung dalam berbagai forum. Citra ini juga digunakan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk merealisasikan visi Jakarta sebagai kota dunia. Selain itu, paradiplomasi yang dilakukan juga bertujuan untuk mencari solusi alternatif atas permasalahan lingkungan yang semakin marak terjadi karena timbul faktor lainnya pula, yakni enggannya masyarakat Jakarta untuk peduli terhadap aksi konservasi lingkungan. Maka

dari itu, pembangunan JIS hingga perhelatan Formula E pun diselenggarakan dengan basis utama ramah lingkungan, agar kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan semakin baik, hingga diharapkan mampu menghalau efek yang cepat dari perubahan iklim.

Selanjutnya, pada poin kedua, yaitu *extent & direction of involvement*, arah keterlibatan Jakarta berupa aktor inisiator dalam rezim lingkungan multilevel. Besarnya pengaruh dan sumber daya yang dimiliki Jakarta sebagai Ibukota negara berimplikasi terhadap keleluasaan dalam melakukan paradiplomasi, dibuktikan dengan terpilihnya Gubernur petahana Anies Baswedan menjadi Komite C40 dan Co-President UCLG-ASPAC. Hal ini tentu juga didukung oleh pendanaan yang baik dari berbagai pihak. Sinergitas antara sumber daya dan *power* yang kuat dari Jakarta berimplikasi positif terhadap perkembangan paradiplomasi Jakarta. Tidak hanya sekadar kerja sama *sister cities*, sejak tahun 2006, Jakarta telah memperluas pengaruhnya ke arah global dengan bergabung sebagai anggota C40. Bahkan pada tahun 2019, Jakarta telah menandatangani *Climate Action Plan* sebagai komitmen serius Jakarta dalam menangani isu perubahan iklim global. Hingga kini, Jakarta telah masuk sebagai anggota C40, UCLG-ASPAC, U20, dan jaringan kota lainnya yang berskala global.

Untuk dimensi struktur dan sumber daya dalam paradiplomasi Jakarta, terdapat kerangka legal yang kuat, yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 269 Tahun 2014 Tentang Pola Kerja Sama Luar Negeri. Peraturan ini tentu sudah cukup sebagai landasan bagi segala tindakan kota Jakarta di berbagai forum internasional. Tidak hanya melegalkan paradiplomasi melalui hukum, Pemerintah DKI Jakarta juga telah mendirikan Biro Kerjasama Daerah dan Hubungan Luar Negeri sebagai portal utama dalam menjalankan paradiplomasi. Adanya kantor khusus hubungan luar negeri menunjukkan keseriusan Jakarta dalam melakukan praktik paradiplomasi. Melalui biro kerja sama luar negeri dan peraturan pemerintah daerah, struktur formal paradiplomasi sudah terpenuhi. Selain itu, salah satu keunggulan yang dapat menjadi nilai bagi Jakarta dalam rezim lingkungan internasional adalah pengalaman dan kemampuan pemerintah DKI Jakarta dalam menghadapi berbagai persoalan yang umumnya terjadi di perkotaan. Jakarta merupakan kota dengan tujuan urbanisasi terbanyak. Selain itu, Jakarta juga merupakan kota terpadat dengan aktivitas ekonomi yang sibuk hingga menimbulkan masalah lingkungan yang tidak sedikit. Kemampuan pemerintah DKI Jakarta dalam menghadapi permasalahan ini menjadi nilai tambah dalam forum diskusi rezim lingkungan.

Menjalani praktik paradiplomasi tidak terlepas dari strategi yang digunakan oleh entitas subnasional. Dalam praktik paradiplomasi hijau, Jakarta selama masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menggunakan dua strategi, yakni strategi primer dan sekunder. Strategi primer, dimana Jakarta menggunakan paradiplomasi hijau untuk meningkatkan eksistensinya sebagai kota dunia dan kota yang ramah lingkungan. Sementara itu, strategi sekunder merujuk pada paradiplomasi sebagai solusi alternatif bagi pemerintah daerah ketika kepentingannya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Berawal dari tuntutan masyarakat Jakarta terhadap pemerintah yang terjadi pada tahun 2019 untuk mengatasi polusi udara yang semakin memburuk, kemudian sebagai *decision maker* yang memiliki kuasa otonom atas daerah yang dipimpinnya, pemerintah daerah Jakarta merasa bahwa kepentingan mereka tidak tercermin dalam kebijakan nasional sehingga beralih ke solusi lain, yaitu paradiplomasi dengan meningkatkan koalisi internasional. Hingga kini, Jakarta tetap mempertahankan partisipasi aktifnya dalam berbagai rezim lingkungan internasional yang bersifat multilevel dengan tujuan untuk mencari cara alternatif dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan merealisasikan cita-cita Jakarta sebagai kota dunia yang aman dan nyaman serta berkelanjutan bagi kehidupan manusia.

4. KESIMPULAN

Kegiatan paradiplomasi yang dilakukan oleh Kota Jakarta sudah lama terjalin sejak tahun 1970 dan sampai saat ini terus mengalami perkembangan yang meluas ke dalam berbagai bidang (*sister city*). Aktivitas ini mengindikasikan bahwa kota Jakarta merupakan salah satu kota yang sukses dalam memainkan peran paradiplomasi di level internasional. Sebagai salah satu ibukota yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup padat sehingga permasalahan atau isu lingkungan serta polusi (air, udara, suara) seringkali menjadi isu utama yang dihadapi oleh Ibukota ini. Dalam masa kepemimpinan Gubernur Anies baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada masa bakti pemerintahan yakni 2017-2022, permasalahan lingkungan masih menjadi isu yang menjadi fokus pemerintah demi mewujudkan kota yang bersih dan rendah akan polusi.

Dalam hal ini Gubernur Anies turut aktif memainkan peran diplomasi kota (*city diplomacy*) sebagai salah satu instrumen terhadap kebijakan yang mengarah kepada lingkungan (*green paradiplomacy*), diantaranya partisipasi dalam Formula E yang berhasil berkontribusi dalam peningkatan *awareness* masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, keikutsertaan Jakarta dalam C40 yang mendorong pemerintah melakukan revitalisasi kawasan yakni Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi dan inisiasi kebijakan peningkatan rumah sakit untuk Pemulihan yang Hijau dan Berkeadilan, serta keikutsertaan Jakarta dalam UCLG-ASPAC yang berimplikasi positif terhadap upaya mewujudkan cita-cita Jakarta sebagai kota global yang *sustainable*. Selain itu, di era pemerintahan Anies Baswedan sendiri, kota Jakarta berhasil meraih beberapa penghargaan seperti Sustainable Transport Awards dan Kota Ramah Sepeda yang turut mendorong pemerintah setempat untuk terus memfokuskan kebijakannya terkait isu permasalahan lingkungan, penurunan emisi karbon, serta permasalahan polusi di Jakarta. Meskipun seringkali terdapat hambatan maupun peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah setempat, kedepannya diharapkan jalinan kerjasama ini dapat terus berlanjut hingga ke tangan pemangku jabatan selanjutnya sehingga Jakarta dapat mewujudkan agenda pembangunannya melalui paradiplomasi berbasis lingkungan.

REFERENSI

- [1] Kuznetsov, A. S. (2014). Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in international affairs. In *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. <https://doi.org/10.4324/9781315817088>
- [2] Schiavon, J. A. (2018). Comparative Paradiplomacy. In *Comparative Paradiplomacy*. <https://doi.org/10.4324/9781351012317>
- [3] Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta. (n.d.). *Tentang Jakarta*. <https://www.jakarta.go.id/tentang-jakarta>
- [4] Simarmata, H. A., & Surtiari, G. A. K. (2020). *Adaptation to Climate Change: Decision Making and Opportunities for Transformation in Jakarta, Indonesia* (Nomor December). [http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/\(httpInfoFiles\)/67AA67E6679798C1802584C7005A4B3A/\\$file/JAKARTA---Adaptation-to-Climate-Change-Discussion-Document-COP25.pdf](http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/67AA67E6679798C1802584C7005A4B3A/$file/JAKARTA---Adaptation-to-Climate-Change-Discussion-Document-COP25.pdf)
- [5] UNFCCC. (2022). Sinking City. *UNFCCC*. <https://unfccc.int/blog/sinking-city>
- [6] Walton, K. (2019). Jakarta's air quality kills its residents – and it's getting worse. *theinterpreter*. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/jakarta-s-air-quality-kills-its-residents-it-s-getting-worse>

- [7] Saputra, H. Y. (2023). Flooding in Jakarta: A Call to Increase Climate Change Awareness. *Columbia Planet School*. <https://news.climate.columbia.edu/2023/03/03/flooding-in-jakarta-a-call-to-increase-climate-change-awareness/>
- [8] CNN Indonesia. (2022, November 20). Perkuat Kolaborasi, Pemprov DKI Jakarta Bertemu Mitra Organisasi. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221120145357-25-876153/perkuat-kolaborasi-pemprov-dki-jakarta-bertemu-mitra-organisasi>
- [9] Indraswari, D. L. (2022). Upaya Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/02/04/upaya-pendanaan-perubahan-iklim-di-indonesia>
- [10] Setzer, J. (2013). *Environmental paradiplomacy: the engagement of the Brazilian state of São Paulo in international environmental relations* (Nomor June). London School of Economics and Political Science.
- [11] Chaloux, A., & Paquin, S. (2013). Green paradiplomacy and water resource management in North America: the case of the Great Lakes-St. Lawrence River Basin. *Canadian Foreign Policy Journal*, 19(3), 308–322. <https://doi.org/10.1080/11926422.2013.845582>
- [12] de Macedo, L. S. V., & Jacobi, P. R. (2019). Subnational politics of the urban age: evidence from Brazil on integrating global climate goals in the municipal agenda. *Palgrave Communications*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0225-x>
- [13] de Macedo, L. S. V., Jacobi, P. R., & de Oliveira, J. A. P. (2023). Paradiplomacy of cities in the Global South and multilevel climate governance: evidence from Brazil. *Global Public Policy and Governance*, 3(1), 86–115. <https://doi.org/10.1007/s43508-023-00060-7>
- [14] Chaloux, A., Séguin, H., & Simard, P. (2022). “All in” climate regime: federated states as autonomous participants to the Paris Agreement the cases of Québec and California. *Canadian Foreign Policy Journal*, 28(3), 265–284. <https://doi.org/10.1080/11926422.2021.2002702>
- [15] Morin, J. F., Fournier, V., & Paquin, S. (2022). The Federated Entities in Environmental Treaties (FEET) Dataset: Questioning Conventional Wisdom on Green Paradiplomacy. *Canadian Journal of Political Science*, 55(1), 226–241. <https://doi.org/10.1017/S0008423921001001>
- [16] Anderton, K., & Setzer, J. (2018). Subnational climate entrepreneurship: innovative climate action in California and São Paulo. *Regional Environmental Change*, 18(5), 1273–1284. <https://doi.org/10.1007/s10113-017-1160-2>
- [17] Smeds, E., & Acuto, M. (2018). Networking Cities after Paris: Weighing the Ambition of Urban Climate Change Experimentation. *Global Policy*, 9(4), 549–559. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12587>
- [18] Utomo, A. B. (2022). Paradiplomacy As the Product of State Transformation in the Era of Globalisation: the Case of Indonesia. *eJournal of International Relations*, 13(1), 63–78. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.13.1.5>
- [19] Harakan, A., Mustari, N., & Kinyondo, A. A. (2021). Sustainable Energy Investment through Paradiplomacy Practices in South Sulawesi, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 277. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127702002>
- [20] Rudiany, N. P., Anggraeni, S. D., Firmansyah, M., & Nurhidayah, G. M. (2021). The implementation of energy diplomacy by sub-state actors: Approaches of Surabaya toward Kitakyushu. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 753(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/753/1/012034>
- [21] Widiana, F., & Utomo, A. B. (2021). Menuju Surabaya Green City Melalui Kerjasama Kota Kembar Surabaya-Kitakyushu. *Transformasi Global*, 8(1), 100–112. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2021.008.01.7>

- [22] Fitriana, N. M. N., Hakiki, B. N. N., & Rubiyanto, C. W. (2022). The Impact of Sister City Surabaya-Kitakyushu Cooperation on Environmental Development in Surabaya. *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 1(1), 27–38. <https://doi.org/10.18196/jpcn.v1i1.15>
- [23] Ummah, K., Nisa, A. H., Kurniawati, D. E., & Purnomo, E. P. (2022). Efektifitas Hubungan Kerjasama Green Sister City Kota Surabaya dengan Kitakyushu. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 46–55. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1114>
- [24] Siregar, N. A. S., & Syafiq Rizqullah, M. F. (2022). Sister City Partnership of Bandung and Kawasaki in the Environmental Sector during 2017-2020. *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 1(2), 98–111. <https://doi.org/10.18196/jpcn.v1i2.23>
- [25] Goh, K. (2020). Flows in formation: The global-urban networks of climate change adaptation. *Urban Studies*, 57(11), 2222–2240. <https://doi.org/10.1177/0042098018807306>
- [26] Luerdi, L. (2023). Jakarta's City Branding as Para-diplomacy: Beyond Greening Stadium and Race. *Janus.net: e-journal of International Relations*, 14(1), 142–169.
- [27] Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Third). SAGE Publications, Inc.
- [28] Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Ed.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (Fifth, hal. 2065–2088). SAGE Publications, Inc.
- [29] Hocking, B. (2013). Patrolling the “Frontier”: Globalization, Localization and the “Actorness” of Non-Central Governments. In *Paradiplomacy in Action* (hal. 23). Routledge.
- [30] Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [31] Situmeang, N., Darmastuti, S., & Nashir, A. K. (2014). Kerjasama Sister City Pemerintah Provinsi DKI Jakarta-Kota Beijing. In *Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional & Internasional* (Vol. 1, hal. 28–33).
- [32] Primawan, H., Dermawan, W., & Ardiyanti, W. (2019). KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEIJING CHINA DALAM SKEMA SISTER CITY. *JPI: Journal of Political Issues*, 1(1), 10–22.
- [33] IQAir Staff Writers. (2022). What determines ‘major cities ranking’? *IQAir*. <https://www.iqair.com/us/newsroom/what-determines-the-major-cities-ranking>
- [34] Putra, R. A., & Djafar, M. R. (2019). Anies Hingga Jokowi Resmi Digugat Karena Udara Jakarta Kotor. *DW.com*. <https://www.dw.com/id/anies-hingga-jokowi-resmi-digugat-karena-udara-jakarta-kotor/a-49470208>
- [35] Gordon, D. J. (2013). Between local innovation and global impact: cities, networks, and the governance of climate change. *Canadian Foreign Policy Journal*, 19(3), 288–307. <https://doi.org/10.1080/11926422.2013.844186>
- [36] Giudicelli, D. (2022). *Exploring the contribution of paradiplomacy to climate resilient development: the cases of Oslo and Nouvelle-Aquitaine* [Norwegian University of Life Sciences]. <https://hdl.handle.net/11250/3023687>

- [37] Ramadhan, F., Susiatiningsih, H., & Eko Wahyudi, F. (2022). Paradiplomasi Provinsi DKI Jakarta Terkait Penyelenggaraan Formula E. *Journal of International Relations*, 8, 489–498. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih><http://www.fisip.undip.ac.id>
- [38] Jakarta Rendah Emisi. (2021). C40. <https://rendahemisi.jakarta.go.id/collaboration/46/c40>
- [39] Ciputra, W. (2022). Action Plan of The Governor of DKI Jakarta In. *Journal Sociae Polites*, 23(2), 130–139. <https://doi.org/10.33541/sp.v23i2.4335>
- [40] Dinas Kesehatan Jakarta. (2022, September 6). Gubernur Anies Baswedan Kerjasama Dengan C40 Untuk Transformasi Kualitas Lingkungan Rumah Sehat di Jakarta. *Dinas Kesehatan Jakarta*. <https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/gubernur-anies-baswedan-kerjasama-dengan-c40-untuk-transformasi-kualitas-lingkungan-rumah-sehat-di-jakarta>
- [41] KBA News. (2022, September 6). Anies Ingin Transformasi Kualitas Rumah Sehat di Jakarta. *KBA News*. <https://kbanews.com/hot-news/anies-ingin-transformasi-kualitas-rumah-sehat-di-jakarta/>
- [42] Kompas.com. (2022). Habiskan Puluhan Miliar untuk Jadikan Kota Tua Zona Rendah Emisi, Biaya Revitalisasi Tidak Berasal dari APBD. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/28/08413941/habiskan-puluhan-miliar-untuk-jadikan-kota-tua-zona-rendah-emisi-biaya?page=all>
- [43] Rahmania, S. A., Heryadi, R. D., & Fathun, L. M. (2019). The Role of UCLG-ASPAC In Managing Waste In DKI Jakarta Province In 2016-2019: Opportunities & Challenges. *Tanjungpura International Journal on Dynamics Economics, Social Sciences and Agribusiness (TIJDESSA)*, 1(1), 81–101.
- [44] Darmawan, R. (2022). Ini 6 Penghargaan Bergengsi Pemprov DKI Jakarta Era Anies Baswedan. *Sindonews.com*. <https://metro.sindonews.com/read/914897/171/ini-6-penghargaan-bergengsi-pemprov-dki-jakarta-era-anies-baswedan-1665994226?showpage=all>
- [45] Tempo.co. (2021). Komunitas Bike to Work Nobatkan Jakarta sebagai Kota Ramah Sepeda. *Tempo.co*. <https://metro.tempo.co/read/1541914/komunitas-bike-to-work-nobatkan-jakarta-sebagai-kota-ramah-sepeda>
- [46] Amerise, A. (2022). China sukses turunkan hampir setengah polusi udara dalam waktu tujuh tahun, bagaimana caranya? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62046737>
- [47] Rianti, E. (2023, Mei). Pj Gubernur DKI Heru Yakin Bantu Memakmurkan Jakarta. *REPUBLIKA*. <https://news.republika.co.id/berita/rv2egi377/pj-gubernur-dki-heru-yakin-bantu-memakmurkan-jakarta>